

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Selama periode 2015-2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah memiliki kecenderungan nilai yang positif. Permasalahannya yang terjadi adalah peningkatan sumber pendapatan dan pengeluaran tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera.

Terlaksananya kebijakan desentralisasi fiskal didorong oleh PDRB, PAD, DAU, DAK, DBH, APBD. Berdasarkan hasil penelitian bukti empiris Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di pulau Sumatera tahun 2015 dan 2019. PAD (pendapatan asli daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB membuat pertumbuhan ekonomi meningkat dan jalannya kebijakan desentralisasi fiskal artinya apabila pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera pendapatan asli daerahnya meningkat maka pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut akan mengalami peningkatan dan jalannya kesejahteraan masyarakat.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa DAU (dana alokasi umum) di Sumatera tahun 2015-2019 menurut kabupaten dan kota berpengaruh positif dan mengalami peningkatan, dengan meningkatnya dana alokasi umum maka jalannya kebijakan desentralisasi fiskal. Artinya dana alokasi umum yang meningkat dapat membangun suatu daerah untuk menjadi lebih maju, membuat perekonomian pada kabupaten dan kota menjadi meningkat dan munculnya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2015-2019 menurut kabupaten dan kota DAK (dana alokasi khusus) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dana alokasi khusus hanya digunakan untuk biaya operasional saja menyebabkan tidak sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal. DBH (dana bagi hasil) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi artinya dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pusat yang di bagi ke masing-masing daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah tersebut. APDB (anggaran pendapatan belanja daerah) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi membuat jalannya kebijakan desentralisasi fiskal. Anggaran pendapatan belanja daerah yang meningkat pada masing-masing kabupaten dan kota berasal dari sumber daya daerah tersebut seperti pariwisata dan UKM daerah tersebut, dengan APBD yang meningkat membuat perekonomian suatu kabupaten dan kota meningkat dan timbulnya pembangunan yang pesat.

IPM (indek pembangunan manusia) berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengalami peningkatan pada masing-masing kabupaten kota di Sumatera, disebabkan oleh tingginya indek pembangunan pada masing-masing daerah tersebut membuat jalannya kebijakan desentralisasi fiskal disertai dengan tingkat ekonomi daerah yang meningkat maka kebijakan desentralisasi fiskal berjalan dengan baik disertai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dalam hasil kajian ini hanya satu variabel yang tidak signifikan yaitu DAK (dana alokasi Khusus), karena dana alokasi khusus hanya digunakan untuk biaya operasional dalam sistem pemerintahan dan tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menyebabkan tidak jalannya kebijakan desentralisasi fiskal pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera tahun

2015-2019. Perbandingan pemilihan model PLS dan FEM dapat disimpulkan metode yang dipilih adalah model Fixed Effect dan perbandingan metode PLS dan REM dapat disimpulkan metode yang di pilih adalah Random Effect. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat berjalan didorong oleh pertumbuhan PDRB, PAD, DAU, DAK, DBH dan APBD.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah harus melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih kiat lagi melalui komponen PDRB, PAD, DAU, DAK, DBH, APBD dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga terlaksananya desentralisasi fiskal dengan baik.
2. Masyarakat dapat membaca dan mengetahui berapa PAD kabupaten/ kota di pulau Sumatera, DAU, DAK, DBH, APBD, IPM dan tingkat pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/ kota di Sumatera tahun 2015 dan 2019.

